

PERKEMBANGAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Oleh: **Zulfikar Ali Buto¹, Hafifuddin²**

^{1,2}Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe
Corresponding Email: zulfikar@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRACT

Education Development under the Ministry of Religion, Kota Lhokseumawe is a sector that is believed to be able to provide new updates for the development of the field of education. But, until now the decentralization of education under the Ministry of Religion of Kota Lhokseumawe has not been seen to provide a new aura for the development of education. The decentralization passed to the area should give a special classification for Kota Lhokseumawe. For this reason, this research is to find out how to increase the decentralization of Islamic education, what fields are given by regional authorities, and to explain the implications of decentralized Islamic education in improving the quality of human resources and education in Kota Lhokseumawe. Researchers conducted research with a qualitative descriptive approach. The results of the research conducted during the 4 months of research indicate an increase in the field of education since the enactment of the decentralization of education, in particular, the field of Islamic education. Among the improvements is to provide prosperity to all instructors within the Department of Religion of Kota Lhokseumawe through incentives, funding, certification, and authorization on the part of schools to recruit instructor energy. Some of the areas responsible for decentralizing education provided are: Areas for Curriculum Development, Human skills development, determination.

Keywords: *Decentralization of Education, Quality of Human Resources, Islamic Education*

ABSTRAK

Pengembangan Pendidikan dibawah Kementerian Agama, Kota Lhokseumawe merupakan sektor yang dipercaya dapat memberikan

pembaruan baru untuk pengembangan bidang pendidikan. Tapi, hingga kini desentralisasi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama Kota Lhokseumawe belum terlihat memberikan aura baru untuk pengembangan bidang pendidikan. Desentralisasi yang dilewatkan ke daerah seharusnya memberikan klasifikasi khusus untuk Kota Lhokseumawe. Untuk itu, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peningkatan desentralisasi pendidikan Islam, bidang apa saja yang diberikan oleh otoritas di daerah, dan untuk menjelaskan bagaimana implikasi desentralisasi pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di Kota Lhokseumawe. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian selama 4 bulan dilakukan penelitian menunjukkan adanya peningkatan bidang pendidikan sejak diberlakukannya desentralisasi pendidikan khususnya bidang pendidikan Islam. Diantara peningkatannya adalah memberikan kemakmuran kepada semua instruktur didalam lingkungan Departemen Agama Kota Lhokseumawe melalui insentif, dana, Sertifikasi dan otorisasi di pihak sekolah untuk merekrut energi instruktur. Beberapa area yang bertanggungjawab mendesentralisasikan pendidikan yang diberikan adalah: Area Pengembangan Kurikulum, Pengembangan keterampilan manusia, penentuan.

Kata Kunci: Desentralisasi Pendidikan, Kualitas SDM, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional di Indonesia telah lama dicantumkan sebagai titik fokus perhatian pemerintah untuk memajukan Bangsa dan Agama. Ketika program tersebut sudah hangat diperbincangkan, maka sejak itu pula pendidikan harus menjadi perhatian nomor satu di antara yang lainnya. Faktor pendukung utama bagi pembangunan Nasional, daerah dan lembaga besar maupun kecil adalah tergantung pada kondisi realita pendidikannya. Jika pendidikan itu hancur atau tertatih-tatih maka dengan sendirinya pembangunan juga akan mengalami kendala, maju mundurnya sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perkembangan pendidikan oleh suatu bangsa tersebut. Artinya pembangunan akan mustahil terwujud jika pendidikan suatu bangsa tersebut tidak memenuhi standarisasi pendidikan yang lebih maju atau lebih baik.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, pendidikan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*). Masyarakat yang cerdas akan

memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula, secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar dalam proses pembangunan di suatu negara, baik dari aspek ekonomi, politik, social dan budaya. Pendidikan menentukan segalanya baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budayanya, pendidikan merupakan pengarah aspek yang ada, pengarah yang benar, pengarah yang lurus dan pengarah yang sosolut. Pendidikan dapat dijadikan penentu segala hal benar atau tidaknya arah pembangunan ke arah pengembangan bangsa dan Agama di masa mendatang.

Terbentuknya kualitas pendidikan yang dapat mengantarkan masyarakat pada kecerdasan dan kemandirian, diperlukan kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan. Kesimpang siuran dalam kebijakan akan menjadikan proses pendidikan terhambat baik tingkat tinggi hingga tingkat bawah (Yogyakarta: 1994: 61). Kebijakan yang terkadang membawa dampak yang negative bagi pertumbuhan pendidikan nasional juga pasti menimbulkan dampak negative bagi pertumbuhan pendidikan di daerah. Jika ditingkat atas saja mengalami ketidak pastian apalagi dengan pendidikan di daerah khususnya. Bagaikan sebuah keluarga yang dimanyortasi orang tua yang berantakan maka anaknyaapun tidak jauh dengan kondisi orang tuanya “buah yang jatuh dari pohon tidak akan jauh dari batangnya”.

Berbagai upaya terus dilaksanakan untuk menemukan format pendidikan yang lebih maju, filosof-filosof pendidikan terus merumuskan teori yang jitu untuk memajukan pendidikan baik tingkat nasional hingga tingkat daerah. Banyak hal sudah dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan dari tingkat prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum hingga ke perguruan tinggi. Perbaikan dimulai dari perumusan visi dan misi pendidikan nasional, dasar dan tujuan pendidikan nasional, perbaikan sumber daya tenaga kependidikan (membenahi infrastrukural pendidikan nasional), memberikan perhatian pada peserta didik (baik yang berupa beasiswa, penggratisan SPP siswa, memberikan perlengkapan pendidikan, dll), selain itu pemerintah mengadakan perubahan kurikulum (bahan ajar), pengembangan strategi dan metode pembelajaran, memberikan perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan, memberikan perhatian terhadap jenjang pendidikan yang terlalu banyak oleh setiap peserta didik, dan yang terakhir adalah memberikan proses evaluasi bagi mereka yang layak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya (Lhokseumawe: 2009:8).

Manarik ketika diperhatikan jika memang pembenahan di atas dilaksanakan dengan baik oleh pendidikan nasional. Salah satu upaya yang

diberikan adalah memberikan hak otonomi pada daerah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun pendidikan yang disesuaikan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah masing-masing. Sistem lainnya pemerintah juga memberikan kewenangan untuk melakukan desentralisasi pendidikan dari berbagai unsur yang terdapat dalam pendidikan tersebut. Dengan adanya desentralisasi pendidikan seharusnya pendidikan di tingkat daerah akan semakin mengalami kemajuan, akan tetapi kemajuan tersebut selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh semua komponen. Pasalnya sejak diberlakukannya hak otonomi daerah bagi Aceh umumnya dan bagi Kota Lhokseumawe khususnya belum sepenuhnya dirasakan memberi dampak yang signifikan bagi pembangunan pendidikan di tingkat daerah. Penemuan dari observasi awal hak otonomi daerah dan desentralisasi berjalan seperti sebuah lebel yang selalu disandingkan pada sebuah produk barang, otonomi dan desentralisasi hanya sebatas tropi yang diberikan kepada seseorang yang berprestasi lalu tropi itu terpajang tanpa adanya langkah untuk mengembangkan dari apa yang telah diperoleh. Tropi tersebut larut dengan pujian dan keagungan dari orang sekitar sehingga melupakan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang seharusnya dilakukan.

Pengembangan pendidikan di bawah Kementerian Agama, Kota Lhokseumawe merupakan sektor yang dipercayai dapat memberikan pembaruan baru bagi pengembangan pendidikan daerah. Namun hingga kini perjalanan pembaharuan tersebut tampaknya belum berjalan dan belum terlihat sama sekali, artinya desentralisasi pendidikan yang berada dibawah Kementerian Agama wilayah Kota Lhokseumawe belum terlihat memberikan aura baru bagi pengembangan pendidikan daerah. Salah satu bukti materi atau kurikulum yang diberikan belum terlihat rancangan yang signifikan sesuai dengan kultur budaya serta keinginan masyarakat setempat. Pendidikan seakan-akan berjalan di tempat perubahan kurikulum dipandang hanya sebatas perubahan administrasi guru yang berupa perubahan bentuk silabus dan rencana pembelajaran pendidikan (RPP). Bidang lainnya adalah sejak berlakunya ujian nasional (UN) pada beberapa tahun terakhir pemerintah daerah sepertinya tidak berani membuat sebuah kebijakan materi pendidikan Agama Islam (PAI) tersebut dijadikan sebagai bidang studi yang di Ujian Daerah (UD) yang menjadi pintu kelulusan dan kenaikan kelas siswa. Kebijakan ini dirasa perlu karena sejak berlakunya desentralisasi pendidikan, maka sejak itu pula pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang diselaraskan dengan budaya dan karakteristik masyarakat setempat. Setidaknya pemerintah daerah berani menetapkan standarisasi pendidikan Islam baik di bawah Kementerian Agama dan dinas Kota Lhokseumawe,

sehingga perhatian siswa terhadap materi Pendidikan Agama Islam (PAI) juga terjadi sebagaimana mata pelajaran yang diujikan nasionalkan. Demikian juga penetapan standar nilai ujian Nasional yang dirasakan kurang rasional dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan kondisi masyarakat serta kemampuan daerah untuk mengelola pendidikan standar evaluasi masih perlu menjadi pertanyaan besar bagi pendidikan pusat selama ini, kecukupan serta kesempurnaan daerah mengelola pendidikan jauh sangat tertinggal dengan apa yang dimiliki oleh pusat. Catatan perkembangan pendidikan daerah jauh tertinggal dengan apa yang selama ini dialami oleh pendidikan di pusat, sehingga masih wajarkah standar kelulusan disamakan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan dan memberikan solusi dari fenomena tersebut dengan menarik judul *Perkembangan Desentralisasi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Islam di Daerah Kota Lhokseumawe*. dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut; Bagaimana perkembangan desentralisasi pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan Islam pemerintah Kota Lhokseumawe?, Bidang apa saja yang diberi wewenang pada daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan Islam pemerintah Kota Lhokseumawe? dan Bagaimana implikasi desentralisasi pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan Islam di pemerintahan Kota Lhokseumawe?

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang nantinya digolongkan pada jenis penelitian kualitatif yang disiskription secara diskriptif kualitatif (Jakarta: 2002: 15). Yaitu pembahasan atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara objektif. Jika ditinjau dari pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan semi yuridis dikarenakan erat kajiannya pada kebijakan pemerintah yang telah dioperasionalkan dalam lembaga pendidikan, walau tidak semi atau tidak sepenuhnya pendekatan yuridis penulis akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

HASIL PENELITIAN

a. Perkembangan Desentralisasi Pendidikan Islam pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Perkembangan Kota Lhokseumawe dari semua sektor terus mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut ditandai

dengan semakin bertambahnya pembangaunan struktural dan infrastruktrual di daerah Kota Lhokseumawe khususnya dan pemerintahan Aceh Umumnya. Perkembangan yang dialami tidak terlepas dari peranan semua lapisan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi, dan pemerintah Kota Lhokseumawe sendiri. Pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh wakil wali Kota Lhokseumawe pada safari Ramdahan malam pertama di Masjid Al-Hikmah Cunda mengatakan Bahwa. “Pembangunan selama ini yang terjadi di Kota Lhokseumawe merupakan hasil kerja sama kita semua atas dukungan dan peran serta jama’ah atau masyarakat Kota Lhokseumawe yang terus mendukung serta memantau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Lhokseumawe. Semoga yang kita lakukan menjadi catatan penting bagi kita untuk terus bangkit dari ketertinggalan dan keterpurukan yang selama ini kita alami, minimal perjuangan untuk membangun Kota Lhokseumawe selama saya menjabat sebagai wali Kota Lhokseumawe dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Lhokseumawe. (Wawancara: 2010)”

Pembangunan yang terjadi merupakan peran aktif masyarakat yang ikut andil mendukung serta ikut juga memantau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Lhokseumawe. Keikutsertaan masyarakat untuk membangun dapat terlihat aktifnya masyarakat untuk membayar pajak pendapatan, perusahaan, kontraktor dan lain sebagainya. Harapan ini hendaknya terus terjadi motivasi, agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya lebih baik dan lebih peka terhadap kebutuhan serta keinginan masyarakat pada umumnya.

Penetapan hak otonomi daerah menjadi angin segar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe. Tanpa terkecuali hak otonomi tersebut pada hakikatnya memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun pengusaha kecil, menengah dan eksekutif untuk merasakan kelancaran serta kesuksesan dalam menjalankan usaha mereka. Sebaliknya pemberian hak otonomi daerah juga akan berdampak negative bagi perkembangan daerah itu sendiri ketika hak tersebut disalah gunakan oleh pengeluar atau pengambil kebijakan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa praktisi pendidikan yang sempat diwawancarai disela-sela penelitian ini. Mereka takutkan adalah sejak berlakunya hak otonomi daerah khususnya dibidang pendidikan adalah akan lahir raja serta anak raja daerah yang rela menggelapkan data dan stempel untuk keperluan keluarga serta sanak saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan atau memudahkan segala urusan guna mendapatkan tujuan. Menurut mereka hal ini sudah mulai terlihat sebagai contoh kecil untuk dapat mengajar di sekolah hari ini menjadi

honor murni bukan lagi melihat atau masuk berdasarkan prosedural namun karena adanya ikatan saudara dengan kepala sekolah (Wawancara: 2010).

Pengembangan di sektor pendidikan yang selama ini terjadi relatif bersifat pengembangan material atau kuantitasnya saja, namun pengembangan kualitas pendidikan serta nonfisiknya relatif terabaikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mapenda Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa:

“Setelah diberlakukan otonomi di daerah banyak hal yang telah diterobos seperti menghasilkan qanun tentang pendidikan, pembiayaan dan ada hasil seperti pemberian tunjangan profesi kerja (TPK), majelis guru mata pelajaran (MGMP) kepada para guru itu terobosan-terobosan yang dilakukan, namun itu hanya bersifat material atau financial saja. Budaya mengajar, budaya mendidik ini yang ketinggalan belum kita lakukan, memang ada selama otonomi daerah dipilih guru-guru teladan tetapi itu hanya bersifat kemas saja, setelah dikemas pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja dan sepak terjang guru tersebut dilapangan, tentang bagaimana kedisiplinan guru tersebut. Jadi hal-hal yang bersifat kepada keterampilan mengajar ini yang belum tersentuh oleh desentralisasi pendidikan (Wawancara: 2010).”

Keterangan lain tentang perkembangan pendidikan juga diperoleh bahwa sejak berlakunya desentralisasi pendidikan selama ini cukup dirasakan bahwa untuk perolehan financial tidak lagi menjadi kendala besar, karena pemberian data atau alokasi dana untuk bidang pendidikan cukup meyakinkan untuk terjadinya pengembangan terlihat dari alokasi dana yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengambil kebijakan khusus perihal pendidikan. Pernyataan ini dibenarkan oleh Mapenda Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa dari segi dana dan pembiayaan itu cepat aksesnya karena kita tidak berhubungan dengan pusat, jadi apapun yang kita minta kepada DPR dapat langsung kita minta demikian halnya dengan membangun fisik sangat mudah bahkan sangat bagus misalnya dalam membangun gedung sekolah.

Permasalahannya sekarang adalah dikurikulumnya karena kita tidak siap dengan sumber daya yang ada, di sekolah umum saja materi Agama atau Muatan Lokal yang diberikan digodok oleh majelis pendidikan daerah (MPD), itu pun belum terserap dengan sepenuhnya mungkin masih butuh proses, masalahnya juga lagi kita tidak mempunyai bank soal dan orang yang mengaturnya juga lemah, seharusnya team penyusunan soal mempresentasikan dulu hasilnya terus digodok sama-sama sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Disini dilibatkan guru-guru sekolah yaitu

guru-guru inti dan juga dilibatkan majelis pendidikan daerah (MPD), tetapi untuk proses ini untuk majelis pendidikan daerah (MPD) sendiri sama sekali tidak dilibatkan, hanya melengkapi struktur saja di dalam pemerintahan ibaratnya hanya untuk menggenapkan saja. Untuk otonomi kurikulum daerah tidak ada, bank soal tidak ada buku pedoman, sedangkan kurikulum Nasional atau kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) memberikan kisi-kisi saja, bukan ruh yang diinginkan oleh kurikulum tersebut yang berjalan namun para guru relatif sibuk mengganti pedoman mengajar sedangkan prosesnya seperti biasanya (Wawancara: 2010).

Pengalaman di atas adalah sebagian besar guru yang berada dibawah departemen Agama yang mengalami ista'na ketika proses pembelajaran berlangsung. Perubahan kurikulum yang seharusnya disesuaikan dengan sumberdaya daerah atau latar belakang masyarakat, namun lagi-lagi perubahan perubahan kurikulum yang diinginkan untuk pengembangan berakhir pada kesibukan guru mengganti pedoman serta laporan pendidikan yang berubah-ubah, namun ruh dari perubahan itu belum ditemukan (Wawancara : 2010).

Berikut beberapa komponen pendidikan yang mengalami pengembangan selama desentralisasi pendidikan di daerah Kota Lhokseumawe, di antaranya: Sumber Daya Manusia, Pengembangan sumberdaya manusia yang telah Nampak selama ini di Kota Lhokseumawe ternyata terus mengalami pengembangan yang relatif pesat. Dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga penerimaan pegawai honor. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Salman yang mengatakan bahwa, pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan terus mengalami pengembangan yang relatif menunjak, penunjukan ini terlihat pada minat masyarakat untuk menjadi guru juga dirasakan oleh beberapa perguruan tinggi mengalami penunjukan setiap tahunnya (Wawancara : 2010). Sebagai program yang terus ditingkatkan oleh pemerintahan daerah adalah memberikan pelatihan yang intensif kepada guru-guru guna dapat meningkatkan profesionalisme guru, memberikan insentif, dana training senter (tc) bagi guru yang diambil melalui dana APBD yang ada, program ini dimaksudkan guna memberikan kesejahteraan bagi guru PNS, honor, guru dayah, dan guru pengajar pada setiap balai pengajian minimal dapat membantu kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya pengembangan kurikulum, Kurikulum merupakan seperangkat pengetahuan yang telah dicencanakan serta terstruktur untuk diberikan kepada peserta didik. Kurikulum yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula, sebaliknya kurikulum yang hancur dengan sendirinya akan terjadi kesalahan yang patal bagi generasi itu sendiri.

Misalkan saja masyarakat petani dilatih atau dibekali dengan pengetahuan untuk mengelola sumber daya laut, sedangkan notabene mereka selalu berhadapan dengan hasil perkebunan. Untuk itu selama ini pengembangan pemerintah untuk mengubah kurikulum sebelumnya (Kurikulum Berbasis Kompetensi) ke pada kurikulum sekarang (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dipandang memiliki dampak positif. Setidaknya keinginan ini tidak dipolitisir oleh pengeluar kebijakan untuk semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok. Observasi yang telah dilakukan saja pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di sekolah Negeri hari ini saja masih perlu dipertanyakan kelancarannya. Sebagian besar sekolah belum sepenuhnya melaksanakan tingkat satuan pendidikan karena terkendala pada tingkat pemahaman serta ketersediaan sarana dan prasana untuk pelaksanaan kurikulum tersebut. hal ini dirasakan oleh sebagian besar para guru di bawah Departemen Agama yang terasa terburu-buru untuk mengedepan perubahan kurikulum. rasionalnya kurikulum sebelumnya masih dalam suasana sosialisasi lalu belum selesai disosialisasikan sudah terjadi perubahan kembali (Wawancara : 2010). Keterangan lain diperoleh terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengatakan bahwa Standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah standar minimal jadi standar minimal itulah yang diajarkan, terserah daerah bagaimana meramu dan mengembangkannya, daerah yang tidak mampu mengembangkan standar minimal tersebut jadi masalah karena yang penting lulus ujian, jadi standar minimal itulah yang harus ada di setiap daerah-daerah. Standar minimal yang diberikan apakah antara Banda Aceh dengan Jakarta adalah sama dari standar minimal dalam kurikulum, kenapa juga Jakarta lebih dengan daerah lainnya tentunya karena mereka memberikan lebih kepada siswa dan mampu meramunya dengan baik (Wawancara : 2010).

Pengembangan kurikulum hendaknya menjadi catatan penting bagi pendidikan di daerah, ada beberapa hal penting dari ruh kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) diantaranya adalah: kurikulum disesuaikan dengan keadaan daerah, kurikulum disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, kurikulum disesuaikan dengan keadaan sumber daya manusianya dan alamnya. Ketika kita melihat latar belakang daerah kita yang dewasa ini sedang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna, namun dimana porsi kurikulum bagi penerapan syariat tersebut. melihat karakteristik masyarakat yang notabene adalah masyarakat pedagang, petani, tambang dan pelaut yang setiap saat memerlukan ulur tangan pengetahuan terhadap yang mereka kelola, dimana porsi kurikulum untuk itu. Belum lagi kita melihat hasil yang mereka capai dengan secara manual mereka memanfaatkan hasil yang diperoleh melalui ekspor keluar daerah

selanjutnya didistribusikan kembali ke daerah dengan harga mencapai 100% lebih mahal dari harga sebelumnya. Kondisi ini sangat menyakitkan hati, namun kenyataannya sedang mengerogoti masyarakat khususnya Kota Lhokseumawe.

Pengalokasian Dana Pendidikan, Dana adalah alat atau penyempurna program agar dapat terlaksana dengan baik. Dana yang dimaksud adalah pengalokasian biaya guna mempelancar program pendidikan daerah sebagaimana sebelum dan sesudah otonomi daerah diberikan. Proposi dana yang selama ini dirasakan sangat memberikan mamfaat bagi daerah sendiri, selain dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) sendiri pendidikan daerah juga disokong atau dibantu oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sendiri. Anggaran pusat dapat berupa biaya operasional sekolah (BOS), pemberian dana program guru sertifikasi, dan lain-lain. Sedangkan dana daerah sendiri dapat berupa pemberian honor guru bagi yang nonpegawai (Honda dan Honor murni), dana insentif, training senter (tc), pemilihan guru teladan, dan lain-lain (Wawancara : 2010).

Perkembangan evaluasi di daerah selama 3 tahun belakangan ini setidaknya jangan terlalu berbesar hati baik murid, guru atau dinas sendiri, namun perlu menjadi renungan bersama terhadap hasil evaluasi terhadap penerimaan siswa daerah di tingkat nasional hitungannya hanya beberapa siswa saja yang dapat menembus perguruan tinggi yang bertaraf nasional dan internasional. Realita ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi kita yang memiliki tingkat atas ternyata belum meyakinkan untuk menduduki bangku universitas yang bertaraf nasional bahkan internasional. Bantuan dana yang diberikan dapat diperkirakan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan baik dibidang evaluasi serta sumber daya manusianya. Selayang pandang pada pelaksanaan pendidikan yang memiliki visi misi daerah yang sangat minim, keinginan serta latar belakang masyarakat jauh dari harapan yang semestinya yang diinginkan. Menarik ketika peneliti mewawancarai pada pihak pendidikan daerah yang mengatakan bahwa dalam lima tahun kedepan, pelaksanaan program pendidikan s2, kemudian sekarang di Kementerian Agama juga sudah memasukkan program ujian akhir madrasah yang namanya Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), ini dalam kaitan memajukan pendidikan Islam daerah untuk tahun ini sudah jalan anak-anak mempunyai tiga kertas hasil yang pertama ijazah, yang kedua surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) dan yang ketiga surat keterangan hasil ujian agama berstandar nasional (SKHUABN), ini dalam rangka supaya anak-anak tidak hanya focus pada ujian nasional (UN) saja dan tidak menganggap itu hal mardinal yang tidak diakui pemerintah itu sudah dimulai sejak sekarang dan

di Kota Lhokseumawe sudah ada namanya Ujian Agama Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) yang master soalnya dikasih oleh kementerian agama pusat jadi kita tinggal koreksi sendiri (Wawancara : 2010).

Program ini sangat direspon positif oleh beberapa guru yang mengatakan bahwa selama ini minat siswa untuk belajar mata pelajaran yang bukan termasuk mata pelajaran yang diujikan nasionalkan terkesan malas untuk belajar, selain itu siswa merasa mata pelajaran tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa karena bukan hal yang menentukan kelulusan mereka ketika akhir tingkatan belajar mereka. Untuk itu program ini diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Pelajaran Agama contohnya selama ini kurang menjadi perhatian para murid selain pelajaran ini menjenuhkan menurut mereka tidak penting karena mereka bisa mendapatkan melalui pengajian-pengajian di beberapa balai pengajian di sekitas rumah tempat tinggal mereka. Setidaknya keseriusan mereka belajar selama ini dengan mata pelajaran yang diujikan nasionalkan sama dengan mata pelajaran yang notabeneanya adalah mata pelajaran yang dapat memperbaiki akhlak mereka.

Majelis pendidikan daerah berharap para pjabat dikementerian agama jujur artinya tidak membocorkan soal tersebut sama juga kualitasnya dengan ujian nasional (UN), itu juga bisa menjadi standar kelulusan karena standar kelulusan sama dengan ujian nasional (UN), menurutnya sebenarnya untuk memajukan pendidikan Islam sudah ada. Cuma harus ada dalam menagemen sekolah dan harus ditopang oleh pemerintah daerah supaya bisa lulus walaupun diluluskan harus ada catatan misalnya pada membaca al-Quran, dilihat hasilnya apakah bacaan al-Quran dia bagus atau tidak misalkan. Gunanya adalah agar sekolah berikutnya mengetahui keadaan siswa yang sebenarnya bukan hanya pada taraf nilai yang tertera pada SKHUN dan SKHUABN milik siswanya.

b. Bidang-bidang yang diberi wewenang pada daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe

Pendidikan adalah salah satu bidang yang menentukan pembangunan pusat bahkan hingga ke daerah. Untuk itu pemberian status atau hak otonomi daerah sekaligus memberikan pada daerah untuk menjalankan hak desentralisasi pendidikan yang sebenar-benarnya akan dapat memulihkan keterpurukan selama ini. Penetapan pemberian hak kewenangan hak penuh dalam menjalankan pendidikan menurut Mapenda Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa sebenarnya hanya pada pengelolaan saja diberikan hak penuh, misalnya pada pengelolaan management berbasis sekolah tentang kurikulumnya itu hak penuh kepada kepala sekolah tidak diinterpensi oleh pihak luar, begitu juga dengan pembagian tugas di sekolah, membuat tugas

ekstrakurikuler itu diserahkan kepada kepala sekolah mau membuat apa. Namun pemerintah hanya memberikan ide-ide saja, misalnya membuat sekolah berstandar internasional (SBI), tetapi kalau masalah kurikulum hanya sedikit yang diberikan misalnya membuat muatan lokal. Lalu apakah dengan pemberian desentralisasi ini dapat memberi dampak pengembangan bagi pendidikan daerah.

Nampaknya sekarang wewenang penuh yang diberikan kepada sekolah diaplikasikan lewat baju seragam, bagi sekolah yang bagus Nampak baju seragamnya bagus-bagus dan bagi sekolah yang dibawah Nampak seragamnya juga lebih murah, jadi otonomi daerah yang diberikan sudah lari untuk seragam yang bagus, bukan untuk membuat pola pembelajaran yang bagus. Peningkatan yang perlu diterapkan caranya, metodologinya, kurikulumnya bagaimana dirancang. Sebenarnya perlu diberikan otonomi dalam pendidikan kurikulum tetap, jadi metodologi pencapaian kurikulum yang berbeda-beda jadi terserah kepada sekolah masing-masing yang merencangkannya (Wawancara : 2010).

Beberapa bidang yang belum tersentuh oleh desentralisasi pendidikan selama ini adalah keorganisasian kelembagaan yang mengalami tekanan-tekanan, penegakan undang-undang (qanun) yang relatif belum tersosialisasi dengan menyeluruh, dan bidang pembinaan yang intensif serta garis koordinasi yang kurang jelas antara pusat ke daerah, daerah dengan pihak pengelola sekolah.

c. Implikasi desentralisasi Pendidikan Islam di pemerintahan Kota Lhokseumawe

Desentralisasi pendidikan Islam di pemerintahan Kota Lhokseumawe khususnya di Aceh pada umumnya terus mengalami pengembangan. Setidaknya pengembangan tersebut tergantung pihak daerah meramunya, jika pengembangan yang bernilai positif akan membangun nilai positif, sebaliknya pengembangan yang bernilai negative akan menghasilkan nilai negative pula. Kendala yang senantiasa menggerogoti daerah yang telah diberikan hak atau wewenang untuk mengembangkan sendiri daerahnya, misalnya pimpinan di suatu daerah hanya berorientasi kepada pembangunan fisik maka arahnya pembangunannya hanya itu saja. selanjutnya pimpinan disuatu daerah yang ingin lulusan di daerahnya sekian persen misalnya, kadang-kadang lulusan banyak tapi kualitas pendidikannya tidak ada, sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Demikian halnya dengan sumberdaya manusia yang kurang profesional, pengelolaan dana daerah yang kurang tepat sasaran, dan kurikulum pendidikan yang amburadul juga menjadi penentu terlaksananya pelimpahan desentralisasi pendidik di daerah.

Berikut beberapa rumusan konsep desentralisasi pendidikan yang selama ini berjalan dengan baik di antaranya implikasi administrasi yang semakin memudahkan untuk mengakses dunia pendidikan, implikasi kelembagaan yang memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan menentukan visi dan misi lembaganya masing-masing, implikasi keuangan atau pengelolaan dana yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan walau masih kurang namun ada, dan implikasi pendekatan perencanaan yang memberikan hak khusus pada daerah untuk dapat menentukan kearah mana pendidikan tersebut akan dikedepankan. Analisis di atas diperoleh melalui observasi dan wawancara dari subjek penelitian, sehingga menghasilkan usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- b. Menyelenggarakan pola pendidikan yang mengacu pada manajemen berbasis sekolah (MBS)
- c. Menentukan sendiri guru-guru yang akan direkrut oleh sekolah
- d. Menentukan sendiri kurikulum yang diselaraskan dengan latar belakang masyarakat
- e. Pengalokasian dana pendidikan sesuai dengan anggaran daerah
- f. Pemberian beasiswa bagi guru yang melanjutkan studi

Pengalaman ini sangat berharga, selain mau memulai pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya pendidikan Agama Islam sudah mau berusaha untuk maju selangkah dengan daerah lainnya. Pengembangan yang dibumbui dengan usaha serta ketekunan tanpa menyerah terhadap sejuta onak dan duri, harak melintang menjadi batu loncatan pendidikan Islam kedepan. Akhirnya pendidikan Islam berkualitas tentu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas pula, dan begitu seterusnya, kualitas sumberdaya manusia ditentukan dengan kualitas pendidikan Islam itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pendidikan daerah sejak berlakunya desentralisasi pendidikan khususnya pendidikan Islam daerah telah dirasakan memberikan dampak yang melegakan. Di antara perkembangan yang dicapai adalah memberikan kesejahteraan bagi para pengajar di lingkungan Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, melalui insentif, dana tc, sertifikasi, dan pemberian kewenangan pada pihak sekolah untuk merekrut tenaga pengajar. Selain itu program pencanangan kurikulum daerah sudah menjadi proritas utama untuk lima tahun ke

- depan, dengan tidak menyempitkan kurikulum nasional. Demikian juga dengan evaluasi pendidikan diprogramkannya ujian mata pelajaran agama kedepan menjadi angin penyegar bagi guru-guru agama untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam keberhasilan siswa kedepan.
2. Beberapa bidang kewenangan desentralisasi pendidikan yang diberikan di daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengembangan Kurikulum
 - b. Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - c. Menentukan sendiri pengoperasionalan dana sekolah
 - d. Dan menentukan standar isi dalam proses pembelajaran yang berimbang pada penentuan standar minimal kelulusan.
 3. Sedangkan implikasi yang diperoleh melalui desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Implikasi administrasi yang semakin memudahkan untuk mengakses dunia pendidikan.
 - b. Implikasi kelembagaan yang memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan menentukan visi dan misi lembaganya masing-masing.
 - c. Implikasi keuangan atau pengelolaan dana yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan walau masih kurang namun ada.
 - d. Implikasi pendekatan perencanaan yang memberikan hak khusus pada daerah untuk dapat menentukan kearah mana pendidikan tersebut akan dikedepankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq dkk. *Paradigma Pendidikan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Abidin Ibn Rusd, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998
- Abu Achmadi, *Islam Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditiya Media, 1992
- Bapennas – Depniknas, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001
- BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussaleh tahun 2009.

- Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Shalihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pusaka UTama, 2002
- Conny Semiawan, *Modul Landasan Akademik Akreditasi Perguruan Tinggi*, Jakarta: BAN-PT, 2005
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma Dan Sistem Islam*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adecita Karya Nusa, 2001
- Habullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/otonomi-daerah/desentralisasi-pendidikan>, diakses pada Tanggal 12 April 2010
- Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003
- Mochtar Bukhari, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994
- Muhammad al-Nuqib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1988
- Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam Terjemahan Hasan Langgulung*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2006.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004
- Rondinelli Denis dan Cheema G. Shabbir, *Decentralization and Development*, California: Beverly Hills, 1983
- Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sri Hargiono, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Artikel: ttp Tahun 2009
- Sugiono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Zulfikar Ali Buto, Hafifuddin, *Diktat Ilmu Pendidikan* Diktat, Jurusan
Tarbiyah, prodi Pendidikan Agama Islam, STAIN Malikussaleh
Lhokseumawe, 2009